

PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT SATUAN POL PP KOTA PALEMBANG

Rusma Rizal¹ M. Noviar²

¹ Universitas Palembang, ² Pegawai Sat Pol PP
Rizaldie2000@gmail.com, mnoviar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang secara parsial Metode penelitian ini menggunakan survey deskriptif dan verifikatif, pengumpulan data lapangan menggunakan teknik kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, dimana dalam penelitian ini terdapat variabel yang berhubungan dan dapat mempengaruhi variabel lain. Populasi penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan 53 sampel. Pengolahan data menggunakan tool analisis SEM PLS . Hasil penelitian menyatakan bahwa Evaluasi anggaran dan Umpan Balik Anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja aparat. Kemudian partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat.

Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kesulitan Tujuan Anggaran Kinerja

PENDAHULUAN

Salah satu indikator yang mengukur kemajuan pemerintah daerah yaitu manajemen keuangan publik. Manajemen keuangan publik memiliki beberapa elemen yang salah satunya adalah anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan sumberdaya alam dan sumberdaya dana yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan (Jalaluddin dan Ibad, 2010).

Anggaran merupakan elemen penting dalam suatu organisasi. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri

dari sejumlah target yang akan dicapai oleh organisasi.

Jalaluddin & Ibad (2010) menjelaskan bahwa penganggaran disuatu daerah sebelumnya dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang sangat menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi.

Mokoginta (2002) menyatakan dalam menentukan besar kecilnya anggaran yang akan digunakan oleh suatu daerah, perlunya dilakukan suatu penyusunan anggaran, dimana dalam kegiatan

penyusunan anggaran harus dipahami bahwa anggaran merupakan suatu instrument kebijakan ekonomi yang dapat diintegrasikan sebagai arah program ekonomi dalam eksplorasi sumber daya secara merata dan anggaran harus diorganisir, sehingga dapat terukur dampaknya terhadap ekonomi secara menyeluruh (Mokoginta,2012).

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik termasuk di pemerintah daerah. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo,2006).

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran pemerintah mengacu pada rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Dalam menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan dalam penyusunan APBD. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.

Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Suatu lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja karyawan yang paling produktif. Partisipasi penyusunan anggaran

merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas organisasi.

Dengan kata lain partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kinerja. Pemerintah daerah pada umumnya membuat anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian dalam pencapaian tujuan organisasinya. Karakteristik tujuan anggaran diharapkan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kerja individu pada institusi pemerintah daerah.

Dalam membuat anggaran pada pemerintah daerah terdapat beberapa karakteristik tujuan anggaran diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran (*budgetary participation*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*) serta kesulitan tujuan anggaran (*budget goal difficulty*) yang terkadang masih dianggap tidak mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah (Mia Milayanti,2012).

Anggaran menjadi alat akuntansi manajerial yang umum digunakan dengan 2 fungsi utama, yaitu (1) sebagai alat untuk menjalankan tujuan melalui perencanaan dan pengkoordinasian aktivitas perusahaan dan (2) sebagai *benchmark* untuk mengevaluasi kinerja aktual. Penganggaran merupakan suatu proses yang rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah.

Hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial merupakan salah satu bagian dari literatur akuntansi perilaku (*behavioral accounting*), Hal tersebut terjadi karena terdapat hasil yang bervariasi ketika dilakukan pengujian mengenai pengaruh

karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan kinerja manajerial dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu atau sering disebut faktor kontijensi seperti budaya organisasi, komitmen organisasi, struktur organisasi, motivasi, *locus of control*, ketidakpastian lingkungan dan masih banyak yang lainnya. Dasar pendekatan kontijensi adalah bahwa tidak ada rancangan sistem akuntansi manajemen yang dapat diterapkan secara efektif semua kondisi, namun hanya efektif untuk situasi organisasi tertentu.

(Widodo,2007) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja suatu lembaga (organisasi) atau sekelompok manusia dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Faktor tersebut meliputi individu (pelaku) dan organisasi. Jika dikaitkan dengan kinerja aparat pemerintah daerah, maka faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut yakni faktor aparatur pemerintah daerah (birokrat) dan organisasi (pemerintah daerah). Oleh sebab itu, jika ingin meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah maka kedua faktor tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan birokrasi.

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama legislatif daerah menyusun kebijakan umum yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kinerja yang optimal dari pelaksana anggaran, sikap dari aparat pemerintah

daerah merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja. Sikap positif dari masing-masing aparat membuat pelaksana anggaran semakin loyal kepada organisasi, sehingga akan memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik. Termotivasi dalam bekerja, bekerja dengan rasa tenang, dan yang lebih penting lagi kepuasan kerja yang tinggi memperbesar kemungkinan tercapainya produktivitas dan motivasi yang tinggi pula. Orang yang tidak merasa puas terhadap pekerjaannya, cenderung melakukan atau menghindari dari situasi-situasi pekerjaan baik yang bersifat fisik maupun psikologis.

Setiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia setiap tahun menyusun anggaran dimana untuk mencapai anggaran yang baik maka perlu diperhatikan beberapa karakteristik tujuan anggaran agar kinerja yang ditargetkan bisa tercapai. Seperti wilayah Kota Palembang yang merupakan salah satu kota administratif yang terdapat diprovinsi Sumatera Selatan. Seperti kota lain, dalam proses penyusunan anggaran Kota Palembang setiap tahun menyusun anggaran sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan. Proses penyusunan anggaran pada Kota Palembang juga sama seperti kota lain yaitu dengan menerapkan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Beberapa fenomena yang terjadi di OPD di beberapa dinas di Kota Palembang adalah masih kurangnya serapan anggaran dari OPD di beberapa dinas di Kota Palembang termasuk di dalamnya Satuan Polisi Pamong Praja. Dari total 62 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, hingga Maret 2021 tercatat serapan anggaran belanja hanya Rp 104 miliar atau sekitar 4 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp 2,6 triliun. Dia mengaku

serapan tersebut tentunya masih sangat rendah. (Alim, 2021).

Tabel 1 1 Anggaran dan Realisasi tahun 2020 Satpol PP Kota Palembang

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA			
		50.504.653.800,00	46.569.790.067,00	(3.934.863.733,00)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.555.441.600,00	24.164.150.625,00	(391.290.975,00)
		24.555.441.600,00	24.164.150.625,00	(391.290.975,00)
2.1.1	Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa	25.949.212.200,00	22.405.639.442,00	(3.543.572.758,00)
2.2		206.000.000,00	163.398.000,00	(42.602.000,00)
	- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	24.273.677.200,00	21.205.106.442,00	(3.068.570.758,00)
2.2.1		24.273.677.200,00	21.205.106.442,00	(3.068.570.758,00)
	Belanja Modal			
2.2.2		1.469.535.000,00	1.037.135.000,00	(432.400.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH			
	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(50.504.653.800,00)	(46.569.790.067,00)	3.934.863.733,00
2.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	46.569.790.067,00	46.569.790.067,00
		0,00	46.569.790.067,00	46.569.790.067,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(50.504.653.800,00)	(46.569.790.067,00)	3.934.863.733,00

Sumber : Laporan Tahunan Satpol PP Kota Palembang

Berdasarkan data laporan anggaran dan realisasi tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang terdapat kelebihan anggaran sebesar 3,9 milyar. Fenomena ini menandakan masih ada kegiatan/proyek yang tidak terlaksana. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa hal termasuk diantaranya karena proyek / kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Fenomena ini menandakan masih adanya kinerja pegawai pada eselon yang membuat anggaran masih belum sesuai dengan rencana kegiatan.

Penelitian Wardani dan Sudaryati (2015) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemda Banjarnegara. Evaluasi anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda Banjarnegara. Penelitian Sari, dan Eni (2019) menunjukkan Partisipasi anggaran, Umpan balik anggaran, dan Evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah Daerah Bantul (Sari and Susliyanti 2020)

Penelitian Apriani dkk (2016) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh

signifikan terhadap kinerja; tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja; evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja; variabel sikap mampu memediasi positif untuk meningkatkan pengaruh partisipasi anggaran; kejelasan tujuan anggaran dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja. (Apriyani, Rasuli, and Taufik 2016)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Akuntansi (*accountancy*) adalah suatu metodologi dan sekumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi dari satuan - satuan ekonomi bagaimanapun bentuknya, terbagi menjadi dua bagian. Pertama, *accounting* merupakan sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan proses terlaksananya pembukuan dalam arti yang luas. Kedua, *auditing* merupakan sebuah pengetahuan atau ilmu yang berhubungan dengan suatu pemeriksaan dan menilai (evaluasi) atas hasil dari proses dari pembukuan tersebut. Karena, nama akuntansi (*accountancy*) lebih lebar meliputi bidang teori, proses pembukuan, penerapan atau praktik, serta pemeriksaan dan penilaian. Sedangkan

istilah *accounting* hanya menunjukkan bidang teori (Sadeli, 2008:77). (Warren,Reeve,2006:114) menurut mereka adalah akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang dapat memberikan sebuah laporan kepada pihak - pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan.

Laporan akuntansi sangat penting digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai sumber informasi utama sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan juga menggunakan informasi lain untuk pengambilan keputusan mengenai perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*Bussines Stakeholder*) merupakan perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan.

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam pengurusan pengskemaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian,2006:171),(Simanjuntak,2005:221) menyebutkan kinerja adalah pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.

Prawirosentono menyebutkan kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi, dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik maka

kemungkinan kinerja organisasi juga baik (Prawirosentono,2009:27).

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik atau pimpinan perangkat daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran digunakan sebagai sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peranan anggaran tersebut, Menurut Argyris (1952) dalam (Binti dan Suryanto,2012:133) juga menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut (Binti dan Suryanto,2012:128).

(Michael,2002:90) menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal dalam perbandingannya dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan akuntabel oleh pemerintah lokal. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah para pembuat kebijakan dan profesional harus merumuskan visi dan tujuan dari rencana strategis mereka dengan menggunakan input dari masyarakat / publik. Jika input dari masyarakat ini tidak diakomodasi maka akan mengundang kritikan, walaupun pemerintahan lokal sudah melaksanakannya secara efisien sekalipun.

Masyarakat semakin kritis untuk menilai program - program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan

kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun lebih dari itu. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan anggaran, maka setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran (Kepmendagri No 29 Tahun 2002).

Karakteristik Tujuan Anggaran

a. Pengertian Karakteristik Tujuan Anggaran

Proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian,2006:89).

Sesuai dengan amanat UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

b. Indikator Karakteristik Tujuan Anggaran

Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang juga disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Dalam kajian teoritis sebagai dasar untuk penelitian ini masih banyak menggunakan kajian teoritis pada sektor privat yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Hal ini dikarenakan variabel-variabel yang diteliti juga masih menggunakan variabel yang diteliti pada sektor privat. Namun tidak mengurangi kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan sektor publik sebagai dasar/acuan dalam penelitian pada sektor publik.

Menurut (Wijayanti dan Solichatun,2005:180) ada 5 karakteristik tujuan anggaran (*Budgetary Goal Characteristics*) yaitu:

1) Partisipasi Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi penyusunan anggaran yang begitu luas menunjukkan betapa luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah untuk memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya sehingga berpengaruh terhadap tujuan pusat pertanggungjawaban anggaran mereka.

Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi pada saat pembahasan anggaran, dimana eksekutif dan legislatif saling beradu argumen dalam pembahasan RAPBD. Anggaran yang dibuat oleh eksekutif dalam hal ini kepala daerah melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah, dan setelah itu kepala daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran.

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut

2) Kejelasan Tujuan Anggaran

Anggaran daerah menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah dapat menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. (Wijayanti dan Solichatun,2005:180) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara

jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggungjawab untuk menyusun dan

(Wijayanti dan Solichatun, 2005:181) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerjapeningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. (Wijayanti dan Solichatun,2005:184) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif daripada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini akan mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki.

3) Evaluasi Anggaran

Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan. Evaluasi anggaran menunjukkan luasnya perbedaan anggaran yang digunakan kembali oleh individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka.

Menurut (Munawar,2006:26) Penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai

kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab.

4) Umpan Balik Anggaran

Umpan balik terhadap tingkat dimana tujuan anggaran dicapai merupakan suatu variabel motivasional yang penting. Apabila anggota suatu organisasi tidak dapat mengetahui hasil yang mereka capai, mereka tidak akan mempunyai dasar untuk merasakan kesuksesan atau kegagalan dan tidak memberikan insentif pada kinerja yang tinggi, yang pada akhirnya mereka dapat mengalami ketidakpuasan. Hal ini dapat memperkuat atau mencegah perilaku-perilaku karyawan.

Salah satu konsep yang dapat digunakan dalam melakukan umpan balik atas hasil yang menguntungkan maupun tidak yang dicapai baik oleh manajer menengah atau bawah adalah konsep penguatan yang positif (Polimeni dkk,1986) dalam (Suparwati,2005:121) Jika terjadi varian yang menguntungkan, manajemen menengah atau bawah harus menerima pujian, promosi, dan/atau reward yang maksimal. Jika terjadi varian yang merugikan, maka manajer tingkat menengah dan bawah tidak boleh dihukum tetapi harus dibimbing untuk memperbaiki hasil yang telah dicapai.

Menurut (Ramandei,2010) Umpan balik anggaran yaitu mengenai tingkat dimana tujuan anggaran telah dicapai yang merupakan variabel motivasional yang penting.

5) Kesulitan Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran adalah *range* dari "sangat longgar dan mudah dicapai" sampai "sangat ketat dan tidak dapat dicapai". Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan

tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan partisipan.

Terdapat pemanfaatan umum bahwa anggaran yang terlalu sulit dicapai mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi untuk melaksanakan anggaran dan bahkan mungkin mereka menjadi frustrasi karena kemungkinan besar yang akan timbul penyimpangan yang tidak menguntungkan dalam jumlah yang tinggi. Akan tetapi anggaran yang terlalu mudah dicapai mengakibatkan para pelaksana tidak merasa ditantang untuk berprestasi karena tanpa bekerja giatpun kemungkinan akan timbul penyimpangan yang menguntungkan dalam jumlah besar.

Dampak tingkat kesulitan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan implikasi bahwa apabila manajer merasa anggaran yang ditetapkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan tidak mudah dicapai maka hal tersebut menurunkan kinerja manajer karena manajer merasa gagal dan frustrasi sebelum mencapainya. Sedangkan apabila anggaran yang ditetapkan terlalu longgar dan mudah untuk dicapai maka manajer merasa tidak termotivasi dalam melaksanakannya karena untuk mencapainya tidak diperlukan usaha yang keras sehingga tidak menimbulkan suatu tantangan.

METODE

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 187 responden yang merupakan golongan I hingga Golongan IV. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling* dimana target responden adalah aparat pemerintah daerah eselon tiga dan empat pada bagian perencanaan keuangan dan anggaran yang menangani dalam penyusunan anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Variabel penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu kinerja aparat pemerintah daerah dan lima variabel bebas (*independent variabel*) yaitu partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran.

Variabel karakteristik anggaran terdiri dari partisipasi anggaran terdiri dari Partisipasi Aparat, Kontribusi Aparat, ikut penyusunan Anggaran, Memberikan usulan ttg anggaran, Memberikan pendapat ttg anggaran, Pengaruh terhadap anggaran final. Kejelasan tujuan anggaran terdiri dari ; Sasaran secara jelas dan spesifik, Sasaran yang jelas mudah mempertanggung jawabkan, Dapat di mengerti oleh aparat dalam pelaksanaan, Aparat jelas melaksanakan pekerjaan. Evaluasi Anggaran terdiri dari Menggunakan dengan dedikasi dan profesionalisme, Memiliki persiapan dan kompetensi, Dapat diandalkan, Selalu melakukan evaluasi terhadap anggaran. Umpan Balik Anggaran terdiri dari indikator Respon dari Atasan, Atasan memberikan penilaian, Jika ada kekurangan Atasan mengingatkan. Kemudian kesulitan tujuan anggaran terdiri dari indikator Mengusulkan anggaran yang dapat dicapai, Membuat standar anggaran, Menerima adanya kelonggaran, Kelonggaran dapat dilakukan. Kinerja Aparat pemerintahan terdiri dari Visi, Tujuan, Profesionalisme, Tepat Waktu, Memimpin, Efektif dan efisien dan Keberhasilan.

Data kualitatif dan data kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data Kualitatif yaitu data yang didapatkan dengan tidak dalam bentuk angka atau berupa uraian kata-kata untuk melengkapi pembahasan (Sugiyono. 2016) untuk data kuantitatif yaitu data yang digunakan berupa angka- atau pengukuran seperti data, jumlah populasi, dan hasil data

kuesioner. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari responden dan data sekunder data yang diperoleh dari sumber lain yang menunjang penelitian ini yang didapatkan bukan oleh peneliti pertama melainkan pada sumber data lainnya (Sugiyono. 2016) Untuk teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, kuesioner, observasi, dan dokumentasi

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara perhitungan dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel pada tingkat sebesar 10 %. Jumlah populasi Golongan III dan IV sebanyak 113 orang. Sampel yang diperoleh sebesar 53 responden yang terdiri dari seluruh Satuan kerja Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Palembang dengan dibatasi pada pejabat Kepala Bidang (eselon tiga) dan sub bidang (eselon empat)

Analisis data dengan menggunakan *Partial Least Square SEM* yaitu suatu analisis yang digunakan penelitian untuk memprediksi dan mengembangkan suatu teori yang sudah ada (Sarwono, J. dan Narimawati 2015). Penelitian ini menggunakan alat analisis *software Smart PLS 3.0*. Analisis *model structural* memiliki beberapa tahap yaitu merumuskan teori *model structural*, lalu Analisis *outer model* kemudian Analisis *inner model*, dan Pengujian Hipotesis (Husain 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini dilihat dari peran gender jumlah laki-laki sebanyak 53 orang atau 100% dan perempuan sebanyak 0 orang atau 0%. Dari peran gender pada penelitian ini terlihat pegawai laki-laki yang mendominasi

pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja. Kaum perempuan tidak ada yang menjadi responden dalam penelitian ini. Responden dalam penelitian ini dilihat dari tingkat pendidikan jumlah tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 orang atau 49,1% dan S2 sebanyak 27 orang atau 50,9%. Dari tingkat pendidikan untuk para pejabat sudah menduduki jabatan Kasi, Kasubbag, Kabid, Sekretariat dan Kabag semuanya sebagian sudah mempunyai jenjang pendidikan S2. Sebagian lagi masih S1 dan sedang menyelesaikan pendidikan S2. Responden dalam penelitian ini dilihat dari tingkat usia jumlah usia 25 - 35 tahun sebanyak 17 orang atau 32,1%, usia >35 sebanyak 36 orang atau 67,9%. Berdasarkan data diatas untuk para pejabat yang berada di golongan III dan IV sebagian besar berusia diatas 35 tahun dan sudah mempunyai pengalaman dibidangnya. Responden dalam penelitian ini dilihat dari Golongan III sebanyak 50 orang atau 94% dan Golonagn IV sebanyak 3 orang atau 5,7%. Ini menandakan para pejabat yang menduduki jabatan diatas masih dominan di Golongan III. Responden dalam penelitian ini dilihat dari masa kerja jumlah pegawai dengan masa kerja 6 – 12 tahun sebanyak 6 orang atau 11,3 % dan masa kerja > 13 tahun sebanyak 47 orang atau 88,7%. Ini berarti masa kerja reponden penelitian ini sebagian besar sudah mempunyai masa kerja diatas 13 tahun dan punya pengalaman yang cukup untuk membuat anggaran.

Persepsi responden terhadap karakteristik Anggaran Partisipasi Anggaran

Dari kuesioner yang di sebar indikator dominan variabel partisipasi Anggaran pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan Partisipasi aparat perangkat daerah dalam penyusunan anggaran sangat berpengaruh terhadap penyelesaian anggaran akhir (final). yaitu

sebesar 4.45. Semetara indikator terendah pada pernyataan Aparat perangkat daerah di Satuan Polisi pamong Praja Kota Palembang dan ikut serta dalam penyusunan seluruh anggaran. dengan nilai rerata 3,85.

Kejelasan tujuan Anggaran

Dari kuesioner yang di sebar indikator dominan variabel kejelasan tujuan anggaran-anggaran pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan sasaran anggaran daerah di Satuan Polisi pamong Praja Kota Palembang dinyatakan secara jelas, dan spesifik. yaitu sebesar 4.58. Semetara indikator terendah pada pernyataan Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dantidak puas dalam bekerja. dengan nilai rerata 4,26.

Evaluasi Anggaran

Dari kuesioner yang di sebar menunjukkan indikator dominan variabel evaluasi anggaran-anggaran pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan Aparat perangkat daerah di Satuan Polisi pamong Praja Kota Palembang telah menggunakan anggaran dengan dedikasi dan profesionalisme, yaitu sebesar 4.60. Semetara indikator terendah pada pernyataan Aparat perangkat daerah di Satuan Polisi pamong Praja Kota Palembang selalu memiliki persiapan dan kompetensi dalam melakukan pekerjaannya dengan nilai rerata 4,40.

Umpan Balik Anggaran

Dari kuesioner yang di sebar menunjukkan indikator dominan variabel umpan balik anggaran pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan Ketika pimpinan berfikir bahwa kinerja saya bagus, dia memberikan umpan balik yangpositifyaitu sebesar 4.45. Semetara

indikator terendah pada pernyataan ketika anggaran yang disusun telah dicapai, pimpinan memberikan pujian ataupun insentif dengan nilai rerata 3,70.

Kesulitan Tujuan Anggaran

Dari kuesioner yang di sebar menunjukkan indikator dominan variabel kesulitan tujuan anggaran pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan kelonggaran dalam anggaran adalah baik untuk melakukan sesuatu yang tak dapat dibuktikan secara resmi yaitu sebesar 4.77. Semetara indikator terendah pada pernyataan Pada keadaan tertentu, aparat pemerintah daerah bersedia menerima adanya kelonggaran (slack) sampai pada tingkat tertentu yang dianggap wajar dengan nilai rerata 3,19.

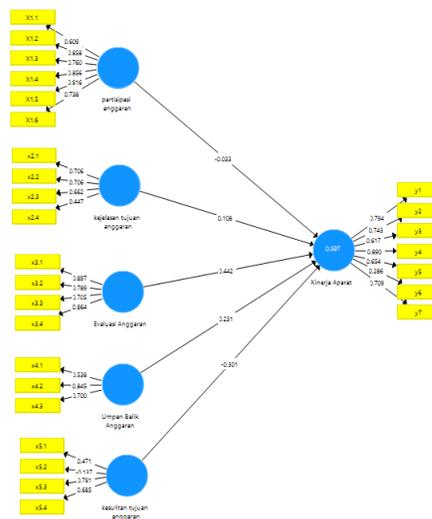
Kinerja Aparat Sat Pol Pamong Praja

Dari kuesioner yang di sebar menunjukkan indikator dominan variabel kinerja aparat pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan Kelonggaran dalam anggaran adalah baik untuk melakukan sesuatu yang tak dapat

dibuktikan secara resmi. yaitu sebesar 4.77 Semetara indikator terendah pada pernyataan Pada keadaan tertentu, aparat pemerintah daerah bersedia menerima adanya kelonggaran (slack) sampai pada tingkat tertentu yang dianggap wajar dengan nilai rerata 3,19.

HASIL

Tujuan dari pengujian *outer model* untuk melihat *validity* dan *reliability* suatu bentuk model. Hasil analisis dari pengujian ini akan memperlihatkan beberapa pengaruh *factor Loading*, kemudian *Average Variance Extratcted (AVE)*, berikutnya *Discriminant Validity*, serta *composite reliability*. Tahap awal dalam pengujian validas suatu model adalah faktor *loading*, syarat faktor *loading* harus > 0,6, agar indikator dikatakan lolos uji valid. Jika tidak lolos uji valid maka dihapuskan dari model yang ada (Husain 2015) Hasil Analisis *outer model* penelitian ini ada pada Gambar di bawah ini:



Gambar 1 1 Hasil Perhitungan outer model SEM PLS

Jika dilihat pada Gambar di atas terlihat bahwa pada variabel laten kinerja aparat terdapat 1 indikator (variabel

manifest) yang harus dihapuskan dari model karena nilai *factor loading* < 0,6 yaitu Y6, dengan pernyataan Pada tahap

evaluasi aparat pemda memelihara dan mempertahankan bawahan, meyeleksi pegawai baru, menempatkan dan mempromosikan bawahan, dalam unitnya atau beberapa unit agar tugas-tugas nya berhasil, yang memiliki *faktor loading* (0,2859)

Kemudian variabel *kesulitan tujuan Anggaran* yang harus dihapuskan dari model dengan pernyataan Aparat perangkat daerah di Pemerintahan Kota Pagaralam mengusulkan suatu anggaran yang mungkin dapat dicapai yang memiliki *faktor loading* (0,4714). Dan pernyataan Aparat perangkat daerah di Pemerintahan Kota Pagaralam membuat dua tingkat (level) standar (anggaran), satu

untuk dirinya dan perangkat daerah yang setingkat dan standar lainnya untuk manajemen puncak supaya aman Adengan faktor loading (0,1348).

Kemudian variabel umpan balik yang harus dihapuskan dari model dengan pernyataan Ketika pimpinan berfikir bahwa kinerja saya bagus, dia memberikan umpan balik yang positif dengan faktor loading (0,5384)

Selanjutnya Kemudian variabel kejelasan tujuan anggaran yang harus dihapuskan dari model dengan pernyataan Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja dengan faktor loading (0,4472).

Tabel 1 2 Loading Faktor model awal

	Kinerja Aparat	Evaluasi Anggaran	Kesulitan tujuan anggaran	Umpan Balik Anggaran	kejelasan tujuan anggaran	partisipasi anggaran
X1.1						0.6088
X1.2						0.8579
X1.3						0.7596
X1.4						0.8564
X1.5						0.9161
X1.6						0.7379
x2.1					0.7058	
x2.2					0.7055	
x2.3					0.6621	
x2.4					0.4472	
x3.1		0.8974				
x3.2		0.7891				
x3.3		0.7049				
x3.4		0.8644				
x4.1				0.538454		
x4.2				0.844889		
x4.3				0.700326		
x5.1			0.4714			
x5.2			-0.1368			
x5.3			0.7912			
x5.4			0.6847			
y1	0.7945					
y2	0.7430					
y3	0.6166					
y4	0.8900					
y5	0.6536					
y6	0.2859					

Kinerja Aparat	Evaluasi Anggaran	Kesulitan tujuan anggaran	Umpan Balik Anggaran	kejelasan tujuan anggaran	partisipasi anggaran
y7	0.7086				

Sumber : data diolah 2022

Nilai yang digunakan dalam pengujian *validitas konvergen* adalah nilai *Average Variance Extracted (AVE)* karena nilai ini didapat dari keluaran *convergent validity*. Syarat penelitian nilai AVE yang disyaratkan adalah lebih besar

dari $> 0,5$ dan jika dilihat dari hasil konstruk variabel laten yang dihitung, semua nilai konstruk didapatkan memiliki nilai lebih besar dari 0.5 untuk lebih jelasnya hasil AVE maka bisa dilihat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 3 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kinerja Aparat	0.7792
Evaluasi Anggaran	0.6679
Umpan Balik Anggaran	0.7027
kejelasan tujuan anggaran	0.8192
kesulitan tujuan anggaran	0.8562
partisipasi anggaran	0.6991

Sumber : data diolah 2022

Hasil perhitungan AVE tidak ditemukan permasalahan terhadap *convergent validity*, maka selanjutnya pengujian yang terkait dengan *discriminant validity*. *Discriminant Validity* ini dilakukan dengan melihat tabel *cross loading*, hasilnya untuk menguji validitas diskriminan dengan indikator dengan ketentuan yaitu , korelasi antara indikator dengan hasil perhitungan variabel latennya arus lebih besar $>$ dibandingkan

dengan hasil perhitungan korelasi antara indikator dengan variabel laten lainnya

Agar tidak ada masalah yang berhubungan dengan pengukuran maka langkah terakhir dalam evaluasi *outer model* adalah dengan cara menguji *unidimensionalitas* dari model yang dikembangkan. Uji *unidimensionality* ini dilakukan dengan melihat hasil perhitungan *composite reliability* dan *alpha cronbach*. Untuk kedua indicator yang dibahas ini titik *cut off value* adalah 0,7.

Tabel 1 4 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Kinerja Aparat	0.9132
Evaluasi Anggaran	0.8886
Umpan Balik Anggaran	0.8238
kejelasan tujuan anggaran	0.9006
kesulitan tujuan anggaran	0.9223
partisipasi anggaran	0.9204

Sumber : Output PLS diolah 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *composite reliability* di atas 0.7. oleh karena itu tidak ditemukan permasalahan *unidimensionality* pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat.

Tabel 1 5 Koefisien determinasi

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Aparat	0.551681269	0.503987787

Sumber : Output PLS diolah 2022

PEMBAHASAN

Koefisien t-Statistik

Dalam melakukan perhitungan pengujian hipotesis PLS SEM ini dilakukan dengan menggunakan dan memperhatikan nilai t hitung (T) yang didapat dan dibandingkan dengan nilai t tabel (t) dari tabel SPSS. Nilai t-tabel dengan signifikansi 5 persen dan *degree of freedom* (DF) = jumlah data (n) – 2 yaitu $53 - 2 = 51$ adalah 2,007 (*t table*)

Tabel 1 6 Nilai Uji Statistik

Pengaruh	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Evaluasi Anggaran -> Kinerja Aparat	3.8666	0.000
Umpan Balik Anggaran -> Kinerja Aparat	2.3449	0.019
kejelasan tujuan anggaran -> Kinerja Aparat	1.5126	0.131
kesulitan tujuan anggaran -> Kinerja Aparat	1.4384	0.151
partisipasi anggaran -> Kinerja Aparat	0.4919	0.623

Sumber : Output PLS diolah 2022

Berdasarkan Tabel diatas Nilai t-statistik evaluasi anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparat sebesar $3.866 > t$ tabel 2.007 dan signifikansi dengan p values $0.000 < 0.05$. Evaluasi Anggaran adalah melakukan penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang telah disusun untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab (Munawar 2006). Hal ini artinya bahwa dalam menyusun anggaran pihak pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah sudah melakukan evaluasi anggaran yakni dengan dedikasi dan profesionalisme, memiliki persiapan dan kompetensi, dapat diandalkan dan selalu melakukan evaluasi terhadap anggaran. Hal ini juga terlihat dari pertanyaan yang di jawab oleh responden sebagian besar berpendapat sangat setuju dan setuju dalam memberikan jawaban mengenai evaluasi anggaran dalam merencanakan pembangunan dan kemajuan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Apriani dkk (2016) Hasil penelitian menyatakan kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Nilai statisitik Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap Kinerja aparat sebesar $2.344 > t$ tabel 2.007 dan signifikansi dengan p values $0.019 < 0.05$. Umpan balik anggaran yaitu mengenai tingkat dimana tujuan anggaran telah dicapai yang merupakan variabel motivasional yang penting (Ramandei 2010). Hal ini artinya bahwa dalam menyusun anggaran pihak pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah sudah melakukan umpan balik anggaran yakni dengan melihat respon dari atasan, atasan memberikan penilaian, jika ada kekurangan atasan mengingatkan aparat pemerintah terhadap anggaran. Hal ini juga terlihat dari pertanyaan yang di jawab oleh responden sebagian besar berpendapat sangat setuju

dan setuju dalam memberikan jawaban mengenai umpan balik anggaran dalam merencanakan pembangunan Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Penelitian Nurzianti dan Anita (2014) dengan judul Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Besar.

Nilai statistik partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja aparat sebesar $0,4919 < t$ tabel 2.007 dan signifikansi dengan p values $0.623 > 0.05$. Partisipasi anggaran merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut (Bangun,2009). Hal ini berarti partisipasi aparat pemda, kontribusi aparat pemda, ikut menyusun, ikut memberikan usulan dan memberikan pendapat terhadap pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang belum maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang belum berperan aktif dalam berpartisipasi membangun kota dengan ikut berpartisipasi dalam menyusun program pembangunan kota.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Penelitian Wardani dan Sudaryati (2015) dengan judul Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda Banjarnegara.(Busyra and Sani,2020)

Nilai statistik kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja aparat sebesar $1.5126 < t$ tabel 2.007 dan signifikansi dengan p values $0.131 > 0.05$ Tujuan anggaran didefinisikan sebagai alat perencana, dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat (Noerdiawan,2006) Hal ini artinya bahwa dalam menyusun anggaran pihak pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah belum maksimal melakukan kejelasan tujuan anggaran yakni dengan menjalankan sasaran secara jelas dan spesifik, sasaran yang jelas dan mudah di pertanggung jawabkan serta dapat dimengerti oleh aparat dalam pelaksanaannya dan aparat sudah jelas dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Sari dan Susliyanti Hasil penelitian menyatakan , Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah Kabupaten Bantul (Sari and Susliyanti 2020)

Nilai statistik kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja aparat sebesar $1.4384 < t$ tabel 2.007 dan signifikansi dengan p values $0.151 > 0.05$ Kesulitan tujuan anggaran adalah tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah dan tujuan partisipan (Munawar 2006). Hal ini artinya bahwa dalam menyusun anggaran pihak pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah belum maksimal memikirkan jika terjadi kesulitan tujuan anggaran yakni dengan mengusulkan anggaran yang dapat dicapai, membuat standar anggaran, menerima adanya

kelonggaran dan kelonggaran-kelonggaran yang dapat dilakukan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nurzianti dan Anita Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV tentang pengaruh karakteristikkesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap kinerja aparat pemerintah daerah di KabupatenAceh Besar (Nurzianti and Anita 2014)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di terima dan hipotesis kedua ditolak. Kejelasan Tujuan Anggaran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di di terima dan hipotesis kedua ditolak. Evaluasi Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di tolak dan hipotesis kedua diterima. Umpan Balik Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Palembang dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di tolak dan hipotesis kedua diterima. Kesulitan Tujuan Anggaran tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di terima dan hipotesis kedua ditolak

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut: Bagi Pemerintahan Daerah Kota Palembang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Pimpinan OPD harus mulai membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.

Daftar Pustaka

- Apriyani, Aulia, M. Rasuli, and Taufeni Taufik. 2016. "Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Akuntansi*, 4(2):161–75.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Binti dan Suryanto. 2012. "Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Hubungan Antara Anggaran Partisipatif Dan Kinerja Manajerial: Studi Empiris Pada Perusahaan Daerah Di Palangkaraya." *Media*

- Ekonomi Dan Bisnis*. 14(2):126–37.
- Busyra, Sarah, and Lutfiah Sani. 2020. “Kinerja Mengajar Dengan Sistem Work From Home (WFH) Pada Guru Di SMK Purnawarman Purwakarta.” *IQ (Ilmu Al-Qur’an): Jurnal Pendidikan Islam* 3(01):1–16. doi: 10.37542/iq.v3i01.51.
- Husain, Ananda Sabil. 2015. *Penelitian Bisnis Dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) Dengan Smart PLS 3.0*. Malang.
- Jalaluddin dan Ibad, Khairul. 2010. “Pengaruh Environment Control Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah.” *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 3(1):84–99.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mia, Milayanti. 2012. “Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Sikap Aparat Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya).” *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan* 2(1).
- Michael, W. S. dan Troy A. 2002. “Financial Performance Monitoring And Customer Oriented Government: A Case Study.” *Journal of Publik Budgeting Accounting & Financial Management* 12(1):87–105.
- Mokoginta, A. 2012. *Penyusunan Anggaran Tahunan*. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Munawar, Gugus Irianto dan Nurkholis. 2006. “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap Dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang.” *Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*.
- Nurzianti, Rahma, and Anita. 2014. “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar.” *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 1(1):58–71.
- Prawirosentono. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ramandei, Pilipus. 2010. “Karakteristik Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern Dan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah.” *Jurnal MAKSI* 10(1):55–73.
- Sadeli. 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, Deltania Lunar, and Eni Dwi Susliyanti. 2020. “. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.” . . *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika* 17(1).
- Sarwono, J. dan Narimawati, U. 2015. *Membuat Skripsi, Tesis Dan Disertasi Dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suparwati. 2005. “Motivasi Sebagai —Moderating Variabell Daalm Hubungan Antara Komitmen Dan Kepuasan Kerja.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 8(2).
- Warren, Reeve, dan Fess (2006). 2006. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta:

- Salemba empat.
- Widodo, Djoko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Banyu Media.
- Wijayanti dan Solichatun. 2005. "Pengaruh Motivasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial. Studi Kasus Pada PT. Angkasa Pura I." *Telaah Bisnis* 6(2):179–99.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007
- Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Kewajiban Melaporkan Kinerja Aparatur Negara di Daerah